

Prosiding Semiar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Sebelas Maret Surakarta
 Sabtu, 07 November 2015

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROSES PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU DI MTs NURUL ULUM MALANG

Riril Mardiana Firdaus¹, Roni Alim Ba'diya Kusufa²
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang
riril_smart@yahoo.com¹, Roni_abk@yahoo.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan proses pembelajaran dilihat dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan pemantauan proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan proses pembelajaran dilihat dari; 1 perencanaan, guru telah menyusun perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP. 2 pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan, guru melaksanakan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang berpatokan pada PAIKEM. 3 penilaian pembelajaran sudah maksimal, penilaian yang diterapkan oleh guru-guru IPS adalah penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik. 4 pengawasan pembelajaran meliputi; a) supervisi, kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala MTs terhadap guru-guru IPS terpadu. Pelaksanaan supervisi terjadwal, ada instrumen supervisi. b) evaluasi, evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, c) tindak lanjut, kegiatan ini meliputi (1) penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, (2) teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar, (3) guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Proses Pembelajaran, IPS Terpadu

ABSTRACT

The objective of this study were to describe and analyze the implementation of the learning process policy which is can be seen from the planning, conducting, evaluating, and monitoring the learning process of the implementation of Social science in IX class in MTS Nurul Ulum Malang. The methods used in this study are qualitative approach with the design of descriptive research. The result of this study showed that the implementation of learning process policy are seen from: (1) the planning of the learning social science including lesson plan and syllabus which is composed by the teacher, (2) The conducting of the learning process been drawn a good result since the teachers have an active, innovative, creative, and effective ways based on PAIKEM method in conducting a class, (3) The evaluating process is reaching a maximum effort since the evaluating process by the social science teachers based on cognitive, affective, and psychometric aspects, (4) the supervision of the learning process in conducting are as follows: a) supervision, which is conducted by the headmaster in a fix schedule and instrument, b) evaluation, evaluation process is aimed to determine the quality of a whole learning process, c) feedback: 1. The awards for the teacher, 2. The warning which is means educating for the teacher, 3. And the opportunity is given to the teacher in joining seminars and workshops.

Key Word: Implementation, Learning Process Policy, Social Science

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat delapan (8) lingkup SNP dimana penelitian ini penulis fokuskan pada standar proses. Rasional peneliti mengangkat standar proses karena standar proses merupakan hal yang sangat penting untuk disikapi secara khusus dan berkaitan langsung dengan peserta

didik sebagai generasi penerus bangsa. Hal tersebut diperkuat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa, standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi kebijakan proses pembelajaran dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran pada mata pelajaran IPS terpadu di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ulum Malang?

Tinjauan Pustaka

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Dunn W. D, 1999: 24-25). Istilah implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan Dunn, Van Meter dan Horn (dalam Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Menurut Sabatier (1986: 21-48), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran adalah sejauh mana guru dapat mendesain perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Pada saat pelaksanaan pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna mencapai tujuan efektivitas pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran IPS terpadu di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ulum Malang adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - a. Rombongan belajar maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah: (1) SD/MI 28 peserta didik; (2) SMP/MTs 32 peserta didik; (3) SMA/MA 32 peserta didik; (4) SMK/MAK : 32 peserta didik. Apabila dalam rombongan belajar melebihi batas yang telah ditentukan maka pembelajaran belum bias dikatakan efektif.
 - b. Beban kerja minimal guru adalah: (1) mencakup kegiatan pokok yaitu, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan; (2) beban kerja guru sebagaimana dimaksud adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
 - c. Buku teks pelajaran meliputi: (1) buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri; (2) rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran; (3) guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya yang relevan; (4) guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Prosiding Semiar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Sebelas Maret Surakarta
 Sabtu, 07 November 2015

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi: (a) Kegiatan Pendahuluan, (b) Kegiatan Inti mencakup; eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, (c) Kegiatan Penutup.

Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ada berbagai macam teknik penilaian, antara lain tes, observasi, penugasan, inventori, portofolio, jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman dan lain-lain. Jadi, penilaian itu sebenarnya tidak harus siswa menjawab soal saja, tapi banyak jenis bentuk lain dari penilaian hasil belajar peserta didik. Kombinasi penggunaan berbagai teknik penilaian di atas akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang kemajuan belajar peserta didik.

Pengawasan adalah bagian terakhir dari empat kegiatan proses pembelajaran. Proses pembelajaran diawali dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan diteruskan dengan penilaian. Bagian akhirnya adalah pengawasan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat (3) yang berbunyi "*Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien*". Keempat kegiatan proses pembelajaran itu merupakan satu kesatuan dengan penanggung jawab yang jelas. Terdapat lima lingkup kerja kepengawasan proses pembelajaran. Kelima lingkup itu adalah pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Hal itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses seperti berikut ini. (a) Pemantauan, (b) Supervisi, (c) Evaluasi, (d) Pelaporan dan (e) Tindak lanjut.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya). IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial yang meliputi: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama (Numan Soemantri, 2001:46).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkap dan mengetahui fenomena apa saja yang belum diketahui. Perhatian penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagaimana suatu gejala muncul. Penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.

Lokasi penelitian ini berada di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ulum Malang yang memiliki berada di Jl. Aipda Satsui Tubun 17 kebonsari Sukun Malang Telp. 0341-835281. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ulum Malang dan semua guru IPS terpadu. Pengolahan data dalam penelitian ini digunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2001:74) yaitu: pengumpulan, reduksi, penyajian data dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan rencana kerja MTs Nurul Ulum Malang tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam RPP yang disusun oleh guru-guru IPS sudah dinyatakan dengan jelas dan sesuai dengan bidang studi masing-masing.
2. Indikator dan tujuan pembelajaran pada matapelajaran IPS sudah dinyatakan dengan jelas dan sesuai dengan KD.
3. Perencanaan strategi, metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran sudah tepat dan bervariasi.
4. Alokasi waktu 1 x pertemuan sesuai dengan ketentuan yaitu 40 menit.
5. Teknik penilaian berbasis kelas dan sesuai dengan acuan.

Prosiding Semiar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Sebelas Maret Surakarta
 Sabtu, 07 November 2015

Pelaksanaan Pembelajaran

1. Sesuai ketentuan pondok pesantren bahwa proses belajar mengajar untuk putra dimulai pukul 07.00 – 12.25. Sedangkan untuk putri jam pelajaran dimulai pukul 12.30 – 17.10. Hal ini menyebabkan alokasi waktu satu jam pembelajaran berkurang menjadi 35 menit sedangkan berdasarkan kurikulum SMP/MTs alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
2. Rombongan belajar memenuhi acuan yaitu rata-rata 32 peserta didik dalam satu kelas, walaupun ada yg berjumlah 36 peserta didik.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPP dimana pelaksanaan pembelajaran meliputi: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
4. Hari minggu tetap dilaksanakan PBM karena hari libur nya adalah hari jum'at, hal ini merupakan kebijakan dari pondok pesantren.

Penilaian Pembelajaran

Tabel 1. Penilaian Pembelajaran

No.	Sub Fokus	Keterangan
1.	Penilaian kognitif	Aspek penilaian ini berupa kuis, tugas, portofolio, ulangan harian dan penugasan
2.	Penilaian afektif	Aspek penilaian ini berupa nilai sikap dan minat siswa.
3.	Penilaian psikomotorik	Aspek penilaian ini berupa praktikum atau kerja ilmiah dan diskusi

Sumber : Jurnal Mengajar Setiap Guru IPS Terpadu

Pengawasan pembelajaran

Ada lima lingkup kerja kepengawasan proses pembelajaran di MTs Nurul Ulum Malang yaitu meliputi: pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Dari kelima ruang lingkup tersebut, kepengawasan dilakukan secara berurutan. Selain itu ada program semester dan program tahunan. Program tahunan akan menjadi acuan bagi pengawas di daerah untuk menyusun program semester.

Pembahasan

Hasil penelitian di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyatakan bahwa: *“Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar”*.

Pelaksanaan pembelajaran pada matapelajaran IPS Terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang berbunyi *“Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup”*.

Penilaian dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran, dan penentuan kenaikan kelas. Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran di MTs Nurul Ulum Malang diselenggarakan kegiatan guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian yang diterapkan oleh guru-guru IPS Terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang adalah:

- 1) Penilaian kognitif, aspek penilaian ini berupa; kuis, tugas, portofolio, ulangan harian dan penugasan.
- 2) Penilaian afektif, aspek penilaian ini berupa; nilai sikap dan minat siswa.
- 3) Penilaian psikomotorik, aspek penilaian ini berupa; praktikum, kerja ilmiah dan diskusi

Penilaian hasil pembelajaran pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar yang menyatakan bahwa; *“penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara*

Prosiding Semiar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Sebelas Maret Surakarta
 Sabtu, 07 November 2015

konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran”.

Pengawasan proses pembelajaran adalah bagian terakhir dari empat kegiatan proses pembelajaran. Ruang lingkup kerja kepengawasan kepala MTs Nurul Ulum Malang ada lima yaitu: 1) pemantauan, 2) supervisi, 3) evaluasi, 4) pelaporan, dan 5) tindak lanjut. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala MTs Nurul Ulum Malang hanya mencakup tiga (3) aspek saja yaitu: Supervisi, evaluasi dan tindak lanjut.

Kelima lingkup pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh kepala MTs Nurul Ulum Malang hanya dapat terlaksana tiga hal yaitu, supervisi, evaluasi, dan tindak lanjut. Sedangkan pemantauan dan pelaporan dokumen tidak ditemukan sehingga peneliti sulit untuk melacaknya.. Kepengawasan merupakan kegiatan yang berurutan, namun apabila ada sebagian yang tidak dapat dilaksanakan maka implementasi kebijakan proses pembelajaran pada matapelajaran IPS terpadu kelas IX belum bisa berjalan dengan baik. Sebab ada hubungan hierarkis dari lima kegiatan itu. Kegiatan diawali dengan pemantauan, diteruskan dengan supervisi, dilanjutkan evaluasi, kemudian pelaporan dan diakhiri oleh evaluasi. Hal yang diawasi adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Hasil pemantauan itu tampil dalam wujud data berupa kondisi riil, kenyataan yang sebenarnya, dan fakta autentik. Hasil pemantauan itu bisa berupa catatan, rekaman, dan dokumentasi. Untuk mendapatkannya dilakukan dengan berbagai cara atau teknik. Tentu saja cara dan teknik itu memerlukan instrumen pemantauan. Instrumen itu pada hakikatnya adalah instrumen pengumpulan data, informasi, dan fakta tentang kondisi riil dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.

Selain ruang lingkup kerja kepengawasan, kepala sekolah juga mempunyai konsep dasar program kepengawasan. Ada dua macam program pengawasan sekolah yaitu program tahunan dan program semester. Program tahunan disusun untuk tingkat kabupaten atau kota oleh beberapa orang pengawas yang ditugaskan khusus oleh koordinator pengawas sesuai dengan kewenangannya. Program tahunan ini menjadi acuan bagi pengawas di daerah tersebut untuk menyusun program semester. Program semester pengawasan sekolah disusun oleh masing-masing pengawas sekolah sebelum yang bersangkutan melakukan pengawasan. Program ini berisi pengawasan seluruh sekolah binaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Program pengawasan sekolah bukanlah program yang berdiri sendiri. Baik program tahunan maupun program semester merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Program tahun ini kelanjutan dan berkesinambungan dari program tahun lalu, begitu pula dengan program semester.

IV. KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan proses pembelajaran dalam aspek perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran IPS terpadu kelas IX di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ulum Malang disusun dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, guru-guru IPS terpadu telah membuat perencanaan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan sesuai dengan PAIKEM. Hal ini terbukti bahwa guru-guru matapelajaran IPS terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang menyusun perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
2. Implementasi kebijakan proses pembelajaran dalam aspek pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran IPS terpadu kelas IX di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ulum Malang dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan pembelajaran pada matapelajaran IPS Terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang sudah sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut terbukti pada saat observasi di lapangan tentang pelaksanaan pembelajaran bahwa guru-guru IPS terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang melaksanakan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang berpatokan pada PAIKEM. Kondisi di dalam kelas terkait dengan fasilitas belajar sudah memenuhi standar, rombongan belajar peserta didik ideal yang berjumlah antara 22-36 siswa, apabila dirata-rata dari empat kelas adalah 29,25 dibulatkan menjadi 30 siswa setiap rombongan belajar, jadi bisa disimpulkan sudah sesuai dengan

standart. Beban kerja guru rata-rata 24 jam pelajaran dalam satu minggu, buku teks pelajaran yang digunakan guru dan siswa sesuai dengan standart isi KTSP 2006, guru-guru IPS terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Mlang melaksanakan pengelolaan kelas secara maksimal sehingga implementasi RPP yang dicapai 71% sampai dengan 85% jika dilihat dari hasil belajar UAS semester satu. Hal tersebut terbukti bahwa pelaksanaan pembelajaran pada matapelajaran IPS terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 tahun 2007 tanggal 23 november tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

3. Implementasi kebijakan proses pembelajaran dalam aspek penilaian pembelajaran pada mata pelajaran IPS terpadu kelas IX di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ulum Malang diterapkan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penilaian yang diterapkan oleh guru-guru pada mata pelajaran IPS terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang adalah penilaian kognitif. Aspek penilaian ini berupa; kuis, tugas, portopolio, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Sementara itu penilaian afektif berupa; penilaian sikap dan minat siswa. Terakhir adalah penilaian psikomotorik, aspek penilaian ini berupa; praktikum atau kerja ilmiah dan diskusi.
4. Implementasi kebijakan proses pembelajaran dalam aspek pengawasan pembelajaran pada mata pelajaran IPS terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang dilakukan oleh Kepala Madrasah. Berdasarkan hasil studi dokumenter hanya ada tiga (3) dokumen pengawasan yaitu supervisi, evaluasi, dan tindak lanjut. Sedangkan pemantauan dan pelaporan dokumen tidak tersip dengan baik sehingga peneliti tidak menemukan datanya.

Saran

Saran-saran yang perlu disampaikan berdasarkan kesimpulan di atas dilihat dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan pembelajaran pada mata pelajaran IPS terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang adalah sebagai berikut.

1. Guru-guru IPS Terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang diharapkan dapat lebih meningkatkan pengembangan silabus dan RPP sesuai kebutuhan kelas, penggunaan metode dan media pembelajaran lebih ditingkatkan lagi karena perencanaan pembelajaran yang matang akan dapat meningkatkan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, evaktif dan menyenangkan.
2. Guru-guru IPS Terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan pelaksanaan pembelajaran supaya pembelajaran lebih aktif, inovatif, kreatif, evaktif dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik sesuai dengan patokan PAKEM.
3. Dalam penilaian hasil pembelajaran yang di lakukan guru-guru IPS Terpadu kelas IX di MTs Nurul Ulum Malang sudah sesuai dengan standar penilaian didalam KTSP yaitu; penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik. Akan tetapi disarankan lebih dikembangkan instrumen penilaiannya supaya lebih variatif dan objektif.
4. Pengawasan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ulum Malang hanya mencakup tiga (3) hal saja yaitu; supervisi, evaluasi dan tindak lanjut, sedangkan pemantauan dan pelaporan tidak terlaksana. Oleh karena itu pengawasan seharusnya meliputi lima lingkup kerja kepengawasan yaitu; Kegiatan diawali dengan pemantauan, diteruskan dengan supervisi, dilanjutkan dengan evaluasi, kemudian pelaporan dan diakhiri dengan tindak lanjut. Lebihlanjut lagi dokumen pengawasan disarankan diarsip secara baik, apa yang dikerjakan ditulis dan yang ditulis dikerjakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Drs. H. Moch. Mu'iz selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Ulum Malang dan segenap dewan guru serta staf tata usaha yang telah memberikan dukungan dan bantuan sepenuhnya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini. Sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam penulis hanya dapat berdoa semoga segala perhatian, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Prosiding Semiar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sabtu, 07 November 2015

Costa, Vincent. P. 2000. *Panduan Pelatihan untuk Pengembangan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

Daldjoeni, N. 1981. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan IPS*. Bandung: Alumni

Depdiknas.2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum

Depag RI.2001. *Perencanaan Pendidikan Menuju Madrasah Mandiri*, Jakarta: Balitbang

Depdiknas. 2003. *UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS*. Jakarta

Depdiknas. 2005. *Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 tahun 2005)*. Bandung: Fokusmedia.

Depdiknas. 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Depdiknas. 2007. *Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses*. Jakarta

Dikmenum, 1999, *Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah* (paper kerja), Jakarta: Depdikbud.

Dunn, William. N 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Englewoods Cliffs, New Jersey: Prentice Hall

Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc. London-England

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.

Hamalik, Oemar. 1990. *Evaluasi kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Hill, M. 1993. *The Policy Process*. New York: Harvester Wheats Heaf.

-----, 1998, *Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* (paper kerja), Depdikbud, Jakarta.

Mazmanian, Daniel dan Sabatier, Paul. 1983. *Effective Policy Implementation*. Lexington Books

Miles dan Huberman. 2001. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Kanisius

Moleong, Lexys. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mutakin, Awan. 1998. *Pengantar Ilmu Sosial*. Bandung: FKIP.IKIP

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara

Ripley, Ronald B and Grace Franklin. 1986. *Policy Implementation Bureaucracy*. Chicago : Dorsey Press

Ross Tasker. 1992. *Effective Teaching. What Can A Constructivist View of Learning Offer?* Australian Science Teachers Journal, Vol. 38, No.1.

Smith, Mark K., Dkk. 2010. *Teori Pembelajaran Dan Pengajaran: Mengukur Kesuksesan Anda Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jogjakarta: Mirza Media Pustaka

Soemantri, Numan. 2001. *Menggagas Perbaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Soemantri, Numan. (2001). *Masalah Pendidikan IPS dalam Perspektif Global*, Makalah Seminar Nasional dan Kongres Forum Komunikasi X Pimpinan FPIPS/FIS/FKIP Universitas/IKIP se Indonesia serta Kongres HISPIPS, 22-24 Oktober.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Terry, George R. 1964. *Principles Of Management*. Richard Rirwin.Inc. Home Woods: Illions

Wheatley,G.H. 1991. *Constructivist Perspective On Science And Mathematics Learning*. Science Education Journal.75. (1). 9-21

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

LOLOS